

OPTIMALISASI ANGGARAN KINERJA MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY DI KABUPATEN BONE BOLANGO

**Meyke Nur Afni¹, Julie Abdullah², Onong Junus³,
Saprudin^{4*}, Mohamad Abdul Radjak Masjhur⁵**

Universitas Gorontalo¹²³⁴⁵

e-mail : Saprudin545@gmail.com

Abstract: Implementing government financial management involves periodic evaluation of the implementation of the financial management system. One way of organizing the state and managing government finances is by using the concept of value for money. Value for money, often called economics, efficiency, and effectiveness, can be used to evaluate local government performance through performance-based budgeting. The data collection technique in this study is documentation by collecting data using the Budget Realization Report (LRA) 2018-2023. The analysis technique used is the economic, efficiency, and effective ratio formula. The results showed that from 2018 to 2021, the financial performance of the Bone Bolango Regency Government was said to be economical, the efficiency ratio of the financial performance of the Bone Bolango Regency Government from 2018 to 2023 was declared less efficient, and in 2018-2023, it was said to be effective.

Keywords: performance based budget, financial performance, value for money

Abstrak: Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan dibutuhkan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan tersebut. Salah satu cara penyelenggaraan negara dan pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menggunakan konsep *value for money*. *Value for money* yang sering disebut sebagai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah melalui penganggaran berbasis kinerja. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan mengumpulkan data dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2018-2023. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan rumus rasio ekonomis, efisiensi dan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai 2021 kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dikatakan ekonomis, rasio efisiensi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 sampai 2023 dinyatakan kurang efisien dan pada tahun 2018-2023 dikatakan efektif.

Kata kunci: anggaran berbasis kinerja, kinerja keuangan, *value for money*

Latar Belakang

Di tengah kompleksitas dan dinamika pengelolaan keuangan negara, penganggaran berbasis kinerja telah menjadi salah satu pendekatan penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi dalam pengelolaan dana publik, serta memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penganggaran berbasis kinerja tidak hanya berfokus pada alokasi anggaran yang memadai, tetapi juga pada pencapaian hasil yang terukur,

baik dari segi output maupun *outcome* yang diharapkan.

Dalam implementasinya, penganggaran berbasis kinerja seringkali diukur melalui berbagai indikator kinerja, salah satunya adalah kinerja keuangan. Menurut (Prasetya et al., 2024) Kinerja keuangan merupakan aspek krusial yang sering menjadi fokus penelitian pada organisasi sektor publik. Sejak diterapkannya sistem penganggaran berbasis kinerja, pemerintah sebagai bagian dari sektor publik dituntut untuk mewujudkan kinerja keuangan yang optimal. Anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan karena berhubungan langsung dengan akuntabilitas pemerintah, terutama dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam anggaran mencakup seluruh proses, mulai dari penyusunan hingga pelaporan anggaran.

Reformasi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah telah mengubah struktur anggaran serta cara penyusunan APBN, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik (Kusumawardani & Nugroho, 2019). Dalam berita yang dibuat oleh Wibowo, (2021), Kabupaten Bone Bolango terpilih sebagai satu-satunya daerah percontohan dalam evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tingkat kabupaten untuk wilayah Indonesia Timur oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Evaluasi ini menggunakan pendekatan *Indonesia Governance Index* (IGI), dengan indikator penilaian yang menekankan pada kinerja berbasis output dan outcome yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah salah satu instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahunnya untuk mengetahui penggunaan realisasi anggaran dan juga untuk membandingkan kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Berdasarkan wawancara awal yang

dilakukan pada 16 Desember 2024 dengan Bapak Reonald Panigoro selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran yang bekerja pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango disampaikan bahwa anggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala sehingga anggaran tidak terealisasi dengan maksimal.

Kendala yang dihadapi antara lain seperti adanya keterlambatan realisasi anggaran yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan dalam setiap rekening, sebagai contohnya yaitu rekening yang seharusnya dicatat ke dalam belanja modal tetapi dicatat ke dalam rekening barang dan jasa, sehingga banyak terjadinya pergeseran anggaran bahkan sering kali realisasi tidak sesuai dengan anggaran. Realisasi anggaran setiap bulan sering kali tidak sesuai dengan rencana penyerapan yang telah ditetapkan, sehingga terjadi penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran. Ketidakseimbangan penyerapan anggaran di setiap triwulan ini mengakibatkan fungsi APBN tidak berjalan secara optimal. Meskipun program pemerintah terlaksana, pencapaiannya belum maksimal.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas publik, pendekatan *value for money* menjadi landasan penting, karena mampu mendorong peningkatan pelayanan publik secara tepat waktu dan terarah. Konsep *value for money* menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara hemat, efisien, dan efektif guna menghasilkan layanan berkualitas tinggi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi serta memperkuat akuntabilitas publik (Utomo & Puspitasari, 2021). Adanya anggaran merupakan bukti yang dapat menjadi acuan serta rencana bagi setiap pemangku kepentingan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah (2003) menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara dengan menerapkan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budget*) di sektor publik. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan

dibutuhkan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan tersebut (Putri & Hapsari, 2022).

Salah satu cara penyelenggaraan negara dan pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menggunakan konsep *value for money*. *Value for money* yang sering disebut sebagai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah melalui penganggaran berbasis kinerja.

Penerapan prinsip *value for money* dapat dikatakan berhasil apabila organisasi mampu memanfaatkan sumber daya dengan biaya terendah untuk menghasilkan output optimal guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Penerapan konsep *value for money* dalam organisasi sektor publik semakin digalakkan sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan akan akuntabilitas publik dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsep ini dianggap mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperbaiki kinerja sektor publik. Dalam rangka memenuhi ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap institusi pemerintah, setiap instansi sektor publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, dituntut untuk meminimalisir praktik kecurangan serta perilaku menyimpang seperti pemborosan dan kebocoran anggaran. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi aspirasi mereka melalui penyelenggaraan administrasi yang transparan dan efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetya et al., 2024) menunjukkan anggaran kinerja keuangan berdasarkan metode *value for money* dengan menggunakan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa pemerintah kabupaten, di mana Keberhasilan tersebut tercermin dari pencapaian target pendapatan daerah serta pengurangan belanja, yang menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang lebih ekonomis dan efektif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya penelitian ini berfokus pada bagaimana evaluasi

terkait dengan anggaran berbasis *value for money* pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango terkait realisasi anggaran yang diukur menggunakan tiga indikator dari *value for money* yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Studi Literatur

Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran pada dasarnya merupakan proses penentuan bilangan untuk suatu objek secara sistematis. Selain itu, pengukuran memiliki peran penting dalam penyajian informasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut (Dewi & Harjanto, 2022), pengukuran adalah suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan besaran kuantitatif dari objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang telah distandarisasi. Kinerja sebagaimana dimaksud dalam (PP nomor 58 tahun, 2005) adalah capaian suatu program atau kegiatan terkait dengan penggunaan anggaran, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dapat diukur.

Menurut Wakhid Yulyianto et al., (2023) *Performance measurement* (pengukuran kinerja) di sektor publik bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di masa depan, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik dan fokus pada pencapaian tujuan serta sasaran organisasi. Laporan yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja (PBK) merupakan pendekatan penyusunan anggaran yang mengaitkan setiap alokasi dana dengan kinerja yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan. Tujuan utama PBK adalah memastikan bahwa setiap dana publik yang dikeluarkan menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur, sehingga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat dinilai secara objektif.

Menurut Mardiasmo, (2021) PBK menekankan keterkaitan antara pendanaan dan hasil kinerja, serta mendorong akuntabilitas publik dalam penggunaan

sumber daya. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia, (2010) dalam Pemerintah Republik Indonesia No. 90 Tahun, (2010) menegaskan bahwa PBK digunakan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran di sektor publik. Dengan demikian, PBK menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada input (jumlah dana), tetapi juga pada hasil nyata (kinerja dan dampak program).

Pendekatan *Value For Money*

Value for Money (VFM) adalah konsep yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi sektor publik, tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga dari aspek non-keuangan, guna menilai keberhasilan proyek yang dijalankan di sektor publik. Konsep ini mengukur efisiensi dan efektivitas program, proses, serta organisasi (Yuliyanto et al., 2023). Indikator yang dimaksud meliputi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Pamel et al., 2024).

Ekonomi adalah kajian mengenai sejauh mana organisasi sektor publik dapat mengendalikan jumlah sumber daya input yang mereka konsumsi, untuk mencegah pemborosan dan ketidakefisienan dalam pengeluaran. Efisiensi merujuk pada rasio *output/input*; ini berarti pencapaian hasil maksimal dengan penggunaan input yang minimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. *Output* adalah barang atau jasa yang dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakannya (Mardiasmo, 2021). Efektivitas merujuk pada sejauh mana hasil suatu program dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Efektivitas lebih fokus pada hasil yang dicapai, sementara ilmu ekonomi lebih berkonsentrasi pada input dan efisiensi dalam proses atau output (Mardiasmo, 2021). Menurut Mardiasmo (2021) dalam bukunya meskipun pihak lain berpendapat bahwa ketiga elemen tersebut saja tidak cukup, namun ketiga elemen tersebut merupakan komponen utama nilai uang.

Pengembangan Hipotesis

Penerapan Anggaran Kinerja Keuangan Berbasis *Value For Money* diukur dengan Rasio Ekonomi

Anggaran adalah elemen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada organisasi swasta atau privat, anggaran biasanya dirahasiakan, sementara dalam organisasi sektor publik, anggaran harus diketahui oleh publik agar dapat dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah (Hasanah, 2020).

Konsep ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut sebagai kehematan, yang mencakup pengelolaan yang hati-hati dan cermat, tanpa adanya pemborosan. Suatu kegiatan operasional dianggap ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Penelitian yang dilakukan oleh Fakhira dan Muttaqin, (2024), bahwa suatu kegiatan dinilai telah mencapai penghematan jika sumber daya keuangan digunakan secara optimal dengan input yang minimal dalam pelaksanaannya. Pengukuran ekonomi memerlukan data anggaran dan realisasinya untuk membandingkan seberapa besar tingkat ekonomi suatu anggaran kegiatan berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik.

Penelitian yang dilakukan oleh DaCunha et al., (2023) menunjukkan persentase penilaian rata-rata sebesar 107,3% di mana hasil tersebut melebihi angka 100% yang berarti Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil mengelola anggaran belanja dengan efisien dan berhasil meminimalkan penggunaan sumber daya, dengan menghindari pemborosan pengeluaran.

Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Baldric, (2017) yang menemukan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau sangat ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ekonomi digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan hasil bahwa pengeluaran anggaran untuk Belanja

Pegawai termasuk dalam kategori sangat ekonomis jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah yang dilaksanakan dengan menggunakan Belanja Pegawai tersebut. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Anggaran kinerja Keuangan Berbasis *Value For Money* sudah Ekonomis.

Penerapan Anggaran Kinerja Keuangan Berbasis *Value For Money* diukur dengan Rasio Efisiensi

Menurut Kariyoto, (2018) *Value for Money* (VFM) terkait dengan Efisiensi adalah perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (*Cost of Output*). Efisiensi terkait dengan produktivitas. Suatu kegiatan operasional dapat dianggap efisien jika produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang minimal (spending well).

Hasil penelitian Polii et al., (2020) pengukuran kinerja keuangan berdasarkan konsep *value for money* dengan menggunakan rasio efisiensi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai efisien, karena berhasil meningkatkan pendapatan melebihi realisasi belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai target yang maksimal.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang ditemukan oleh Yuliyanto et al., (2023) di mana tingkat efisiensi pada objek penelitiannya di Dinas X pada tahun 2020-2021 memiliki kriteria sangat efisien. Pernyataan ini dibuktikan dengan efisiensi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang berada pada persentase dengan kriteria sangat efisien. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan anggaran belanja dilakukan secara efisien. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Anggaran Kinerja Berbasis *Value For Money* sudah Efisien

Penerapan Anggaran Kinerja Berbasis *Value For Money* diukur dengan Menggunakan Rasio Efektivitas

Menurut (Wakhid Yuliyanto et al., 2023) efektivitas adalah perbandingan

antara tujuan dan hasil yang tercapai, sehingga semakin dekat hasil dengan tujuan yang diinginkan, semakin efektif rencana tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Diva et al., (2024) di mana dari segi rasio efektivitas, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Persentase rata-rata pencapaian rasio efektivitas juga berada di atas 100% yang berarti bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah stabil selama 3 tahun. Namun, kinerja keuangan Pemerintah Daerah secara efektivitas masih terdapat ruang untuk peningkatan agar efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok tetap berada dalam rentang stabil. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dapat dikategorikan efektif apabila rasio yang tercapai mencapai seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kemampuan daerah tersebut. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Anggaran Kinerja Berbasis *Value For Money* Sudah Efektif

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2023 dengan objek penelitian pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dan indikator sebagai acuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipakai adalah data sekunder, yang dimana data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda. Dokumentasi merupakan upaya yang dilakukan

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional Variabel	Indikator
Anggaran Berbasis Kinerja	Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.	1. Pengukuran Kinerja 2. Penghargaan dan Hukuman 3. Kontrak Kinerja 4. Kontrol Eksternal dan Internal 5. Pertanggungjawaban Manajemen (Sirait et al., 2022)
Pengukuran Kinerja	Pengukuran kinerja adalah proses suatu organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program.	1. Masukan (<i>Input</i>) 2. Keluaran (<i>Output</i>) 3. Hasil (<i>Outcomes</i>)
<i>Value For Money</i>	<i>Value for money</i> merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas	1. Ekonomis 2. Efisiensi 3. Efektifitas

untuk mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen sektor publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun 2022-2023. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang diterapkan adalah kuantitatif deskriptif yang didasarkan pada perhitungan rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui konsep *value for money*, yang dikembangkan oleh Mardiasmo, (2018), yaitu sebagai berikut ini.

Rasio Ekonomis

Rasio ekonomi merupakan metode untuk mengukur sejauh mana efisiensi pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik, yang memerlukan data dari anggaran pengeluaran dan realisasinya(Prasetya et al., 2024). Semakin tinggi persentase rasio ekonomi, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Adapun rumus ekonomis menurut Mahmudi, (2019) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Biaya Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi

Efisiensi mengukur sejauh mana penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi menghubungkan antara pendapatan dan belanja daerah dengan besarnya biaya pemungutan terhadap realisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah. Adapun

rumus efisiensi menurut Mahmudi, (2019) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menghitung seberapa besar belanja daerah yang ditetapkan sesuai dengan target yang dapat dicapai setiap tahun, dan tingkat ketercapaianya dapat dilihat dari realisasi pendapatan daerah yang diperoleh setiap tahunnya. Adapun rumus untuk menghitung rasio efektivitas menurut Mahmudi, (2019) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil Penelitian dan Pembahasan (bold)

Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan *Value For Money* (VFM) Rasio Ekonomis

Pada penelitian ini rasio ekonomi merujuk pada bagian efisiensi ekonomi Ketika sumber daya diperoleh dengan biaya terendah atau mendekati harga pasar. Adapun rumus ekonomis menurut Mahmudi, (2019) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Biaya Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2 adalah perhitungan rasio ekonomis tahun 2018 sampai 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pada Tabel 2, untuk tahun 2018 dan 2021 mencapai 92,83% dan 91,32%. Sedangkan pada tahun 2019 dengan hasil persentasenya sebesar 95,64%. Bahkan pada tahun 2020 dan 2023 hampir mencapai

Tabel 2. Perhitungan Rasio Ekonomis 2018–2023

Tahun	Realisasi Biaya Belanja Daerah	Anggaran Biaya Belanja Daerah	Rasio Ekonomis (%)	Keterangan
2018	958.487.778,80	1.032.497.030.165,00	92,83	Ekonomis
2019	997.640.190.347,00	1.045.051.160.530,52	95,64	Ekonomis
2020	955.340.258.355,20	991.596.897.115,68	96,34	Ekonomis
2021	970.624.784.491,02	1.062.878.884.547,48	91,32	Ekonomis
2022	951.155.247.790,40	1.083.524.019.916,88	87,78	Cukup Ekonomis
2023	988.951.541.889,00	1.026.878.618.104,80	96,31	Ekonomis

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efisiensi tahun 2018–2023

Tahun	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
2018	1.032.497.030.165,00	1.046.497.030.165,44	98,66	Kurang Efisien
2019	1.045.051.160.530,52	1.056.301.160.530,52	98,93	Kurang Efisien
2020	991.596.897.115,68	993.551.550.751,00	99,80	Kurang Efisien
2021	1.062.878.884.547,48	1.063.533.981.670,00	99,94	Kurang Efisien
2022	1.085.414.019.916,88	1.085.414.019.916,88	99,83	Kurang Efisien
2023	1.026.878.618.104,80	1.028.128.618.104,80	99,88	Kurang Efisien

maksimal dengan besaran persentase masing-masing sebesar 96,34% dan 96,31%. Hal ini dapat dicerminkan pada bagaimana penerapan penggunaan anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dilakukan hampir sempurna dikarenakan jumlah anggaran yang disediakan pada tahun 2020 adalah Rp. 991.596.897.115,68 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 955.340.258.355,20.

Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.026.878.618.104,80 dengan jumlah realisasi anggaran Rp. 988.951.541.889,00. Ini artinya, pada tahun 2020 dan 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat meminimalisir pengeluaran boros dan pengeluaran yang dianggap tidak produktif. Hal tersebut juga mencerminkan bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango telah melakukan penghematan anggaran cukup besar pada tahun 2020 dan 2023.

Lebih lanjut, pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dianggap cukup ekonomis dengan besaran persentase sebesar 87,78%. Anggaran biaya belanja daerah yang disediakan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.083.524.019.916,88 sementara untuk jumlah realisasinya sebesar Rp. 951.155.247.790,40. Terdapat sejumlah selisih yang lumayan signifikan pada tahun 2022 dikarenakan pada bulan September 2022 tercatat ada penyaluran anggaran

kurang lebih Rp. 123 Miliar yang merupakan dana pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Oleh sebab itu, anggaran yang tersedia tidak bisa direalisasikan secara menyeluruh. Dana PEN yang disalurkan pada Pemerintah Daerah diterima pada bulan September 2022, empat bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Sementara dana PEN sendiri banyak digunakan pada berbagai pekerjaan fisik yang tidak bisa diselesaikan dengan sisa waktu sebelum tahun anggaran 2022 yakni empat bulan. Sehingga tercatat pada laporan keuangan anggaran (LRA) tahun 2022 masih tersisa saldo kas atas penerimaan dana PEN yang selanjutnya direalisasikan atau dilanjutkan kegiatannya pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2023.

Rasio Efisiensi

Dalam penelitian ini rasio efisiensi ini mengevaluasi sejauh mana suatu entitas memanfaatkan sumber dayanya secara optimal dalam menghasilkan pendapatan, dengan mengandalkan analisis terhadap data keuangannya. Adapun rumus efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini menurut Mahmudi, (2019) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 menunjukkan bahwa belanja operasi memiliki porsi yang sangat dominan terhadap pendapatan daerah, dengan rasio efisiensi berkisar antara

60,72% hingga 86,63%. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 (86,63%), dan yang terendah pada tahun 2022 (60,72%). Hal ini menandakan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk kebutuhan rutin, seperti gaji pegawai, pemeliharaan fasilitas, dan operasional lainnya. Tingginya belanja operasi menunjukkan kuatnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pengeluaran rutin, yang cenderung kurang produktif secara langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, belanja modal yang seharusnya menjadi pendorong utama pembangunan daerah dan investasi jangka panjang justru menunjukkan proporsi yang relatif kecil terhadap pendapatan daerah.

Rasio efisiensi belanja modal berkisar antara 13,17% hingga 23,13%, dengan rasio tertinggi pada tahun 2022. Angka ini mencerminkan keterbatasan alokasi anggaran untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pengadaan barang modal, serta investasi daerah yang berpotensi memberikan dampak ekonomi berkelanjutan. Hasil temuan ini dapat dilihat dari besaran persentase dari tahun 2018 sampai 2023 diatas angka 90%. Sesuai kriteria yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jika angka persentase berada di atas 90% dan di bawah 100% dikatakan kurang efisien. Hal ini menggambarkan selama berturut-turut kegiatan operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kurang optimal atau kurang produktif.

Rasio Efektifitas

Efektivitas pada hakikatnya berkaitan dengan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukurannya dilakukan dengan menilai sejauh mana kebijakan, prosedur, serta hasil output yang

dihasilkan dapat memenuhi atau mendukung pencapaian tujuan tersebut. Adapun rumus untuk menghitung rasio efektivitas menurut Mahmudi, (2019) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa selama enam tahun terakhir, kontribusi pendapatan transfer terhadap Pendapatan Daerah masih mendominasi. Pada tahun 2018, kontribusi PAD hanya sebesar 6,22% dari total Pendapatan Daerah, sedangkan pendapatan transfer mencapai 66,80%. Pola ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan kontribusi PAD berkisar antara 6–12%, sedangkan pendapatan transfer secara konsisten berada di atas 60%.

Namun, terdapat tren peningkatan kontribusi PAD dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2020 kontribusi PAD tercatat sebesar 7,47%, meningkat menjadi 8,51% pada tahun 2021, dan mencapai 12,27% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya dari pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal, memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD. Meskipun begitu, dominasi pendapatan transfer menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih tergolong rendah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH), menunjukkan bahwa banyak daerah belum mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri.

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektivitas tahun 2018-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2018	975.640.606,512,13	1.046.497.030.165,44	93,23	Efektif
2019	976.537.865,263,44	1.056.301.160.530,52	92,45	Efektif
2020	962.484.650,511,60	993.551.550.751,00	96,87	Efektif
2021	1.011.278.714.624,79	1.063.533.981.670,00	95,09	Efektif
2022	1.055.440.472.966,87	1.085.414.019.916,88	97,24	Efektif
2023	941.905.420.996,24	1.028.128.618.104,80	91,61	Efektif

Pembahasan

Penerapan Kinerja Keuangan Berbasis Value For Money diukur Dengan Rasio Ekonomis

Hasil temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa hipotesis pertama atau H1 diterima. Artinya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sudah menerapkan anggaran kinerja keuangan secara ekonomis. Perkembangan rasio ekonomis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk tahun 2018 sampai 2021 terbilang sangat konsisten. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang disediakan masing-masing pada tahun 2018 sampai dengan 2021 dengan persentase digunakannya tidak lebih besar dari jumlah anggaran yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan data dari tahun 2018 hingga 2023, terlihat bahwa belanja operasi memiliki porsi yang jauh lebih besar dibandingkan belanja modal dalam struktur anggaran belanja daerah. Hal ini tergambar dari perbandingan rasio ekonomis untuk kedua jenis belanja terhadap total anggaran belanja daerah.

Pada tahun 2018, belanja operasi menyerap 73,85% dari total anggaran, sementara belanja modal hanya 18,98%. Selisih yang cukup besar ini menunjukkan dominasi pengeluaran untuk kegiatan rutin dan operasional pemerintahan dibandingkan dengan investasi pembangunan.

Tahun 2019 memperlihatkan tren serupa, di mana belanja operasi meningkat menjadi 77,12%, sedangkan belanja modal menurun tipis menjadi 18,29%. Ketimpangan ini semakin melebar pada tahun 2020, ketika rasio belanja operasi mencapai titik tertinggi sebesar 83,98%, dan belanja modal turun drastis ke 12,36%. Ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap belanja rutin, dan kemungkinan minimnya alokasi untuk belanja yang bersifat produktif atau strategis.

Pada tahun 2021, meskipun rasio belanja operasi menurun menjadi 77,58%, belanja modal hanya sedikit meningkat ke 13,74%, yang masih menunjukkan ketidakseimbangan alokasi anggaran. Perubahan signifikan mulai tampak pada

tahun 2022, di mana belanja operasi turun ke 58,19% dan belanja modal naik ke 13,48%. Ini mengindikasikan adanya pergeseran prioritas anggaran ke arah yang lebih seimbang. Tahun 2023 mencatatkan belanja operasi sebesar 63,79% dan belanja modal sebesar 15,70%. Meskipun masih terdapat dominasi belanja operasi, peningkatan porsi belanja modal menunjukkan arah perbaikan dalam pengelolaan anggaran.

Secara umum, data ini mencerminkan bahwa selama periode enam tahun, anggaran belanja daerah lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan operasional dibandingkan dengan pengeluaran modal. Ketidakseimbangan ini dapat berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur atau pengadaan aset tetap yang bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus menyeimbangkan komposisi anggaran, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan belanja modal yang produktif. Hasil pengujian ini mendukung temuan yang telah dilakukan oleh Setiawan et al., (2020) yang menunjukkan hasil kinerja yang dilaksanakan sudah ekonomis. Hal ini terlihat dari total anggaran yang dialokasikan setiap tahun, yang tidak sepenuhnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan seluruh program kerja tahunan, meskipun nilai rata-rata output yang dicapai tetap dapat diukur. Itu juga dibuktikan dari adanya penghematan anggaran besar-besaran dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Balithi.

Penerapan Kinerja Keuangan Berbasis Value For Money diukur Dengan Rasio Efisiensi

Hasil temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa hipotesis kedua atau H2 ditolak. Artinya anggaran kinerja keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dianggap belum efisien. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh adanya pemborosan anggaran terkhusus pada belanja daerah sehingga menyebabkan alokasi dana yang ada tidak digunakan secara optimal bahkan bisa

dinilai tidak sesuai dengan tujuan utama mendukung maksimalisasi program kerja. Ini juga disebabkan karena ketidakoptimalan dalam penggunaan dana atau sumber daya yang menyebabkan hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan pengeluaran yang dilakukan. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran daerah masih belum optimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dominasi belanja operasi dalam struktur APBD menunjukkan potensi risiko efisiensi fiskal jangka panjang, karena anggaran tidak diarahkan secara proporsional untuk pembangunan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi strategi penganggaran, khususnya dalam mendorong peningkatan belanja modal sebagai bentuk investasi pembangunan. Dalam konteks teori efisiensi fiskal, kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya mencerminkan prinsip efisiensi ekonomi, di mana belanja seharusnya lebih diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.

Penelitian ini mendukung hasil temuan yang dilakukan oleh Alfredo et al., (2025) dengan hasil temuan menggunakan rasio efisiensi bahwa dalam tiga tahun terakhir Kabupaten Manggarai kurang efisien yang menggambarkan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat efisiensi yang diharapkan. Sebaliknya, penelitian ini bertolak belakang dengan temuan yang lebih dulu dilakukan oleh Erika & Wahyuni, (2023) Pada penelitiannya menggunakan pendekatan *value for money* dengan rasio efisiensi ditemukan bahwa dalam pengukuran kinerja keuangan Provinsi Sumatera Utara dinyatakan efisiensi. Hal tersebut menunjukkan hasil yang dicapai sudah sesuai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Penerapan Kinerja Keuangan Berbasis *Value For Money* diukur Dengan Rasio Efektivitas

Pada penelitian ini mengindikasikan bahwa Hipotesis ketiga atau H3 yang

dirumuskan dalam penelitian ini diterima. Pernyataan ini sesuai dengan kriteria yang digunakan dalam penelitian, jika angka persentase berada di atas 90% dan di bawah 100%, maka dikatakan efektif. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan maka akan semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Data hasil uji tabel, mencerminkan adanya tren peningkatan rasio efektivitas dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan keberhasilan Kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan program kerja serta menyelenggarakan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa konsistensi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sangat tinggi terhadap kemampuannya dalam merealisasikan Sebagian besar pendapatan yang dianggarkan. Meskipun hasil yang ditemukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sudah efektif, peningkatan kinerja tetap harus dilakukan melalui evaluasi terhadap layanan yang diberikan, guna terus mendorong peningkatan kepuasan masyarakat. Efektivitas Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan mencapai tingkat yang lebih optimal apabila tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik terus mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer terhadap total Pendapatan Daerah selama periode 2018 hingga 2023. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana kemandirian fiskal daerah dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

Fenomena ini menjadi perhatian penting dalam konteks otonomi daerah. Idealnya, daerah mampu membiayai sebagian besar kebutuhan fiskalnya dari PAD, sehingga kebijakan dan pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Margareta et al., (2023) dengan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2019 sampai 2021 dikategorikan sangat efektif.

Walaupun pada tiga tahun tersebut sempat terjadi penurunan angka persentase tetapi masih berada pada angka presentasi di atas 90%. Hal ini menggambarkan realisasi anggaran belanja langsung hampir mendekati target belanja langsung yang dianggarkan.

Sebaliknya, penelitian ini bertolak belakang dengan hasil temuan Erika & Wahyuni (2023) dengan hasil uji tidak efektif. Kurangnya efektivitas tercermin dari realisasi pendapatan yang tidak mencapai target anggaran yang telah diproyeksikan. Situasi ini menandakan bahwa pencapaian program masih berada di bawah standar yang diharapkan. Efektivitas sendiri berkaitan erat dengan sejauh mana suatu organisasi berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Apabila tujuan tercapai, maka organisasi dapat dinilai telah menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas tidak bergantung pada jumlah dana yang digunakan, melainkan lebih menekankan pada kesesuaian antara tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dengan pendekatan konsep *value for money* menggunakan tiga rasio yakni rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pada tahun 2018 sampai 2021 kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dikatakan ekonomis. Selanjutnya pada tahun 2022 dinilai kurang ekonomis, namun kembali dinyatakan ekonomis pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2022 terjadi penerimaan anggaran dana PEN yang tidak habis dipakai pada tahun 2022 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2023. Kemudian hasil pengukuran untuk rasio efisiensi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 sampai 2023 dinyatakan kurang efisien. Hal ini disebabkan karena adanya pemborosan anggaran terkhusus pada belanja daerah sehingga menyebabkan alokasi dana yang ada tidak digunakan secara optimal. Terakhir kinerja keuangan

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 sampai tahun 2023 dikatakan sangat konsisten dengan hasil pengukuran yaitu efektif. Ini mengindikasikan keberhasilan Kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan program kerja serta menyelenggarakan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat.

Saran untuk penelitian ini kepada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) untuk lebih mempertimbangkan penggunaan anggaran daerah yang belum optimal, upaya akan difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara maksimal guna menghindari kerugian yang melebihi target atau sasaran yang telah direncanakan. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Bone Bolango diharapkan untuk terus menjaga serta meningkatkan kualitas kinerjanya demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang unggul, sekaligus meraih keberhasilan dalam aspek pembangunan ekonomi, serta pencapaian efisiensi dan efektivitas. Dikarenakan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian dengan sumber data yang berasal dari data primer seperti wawancara langsung maupun observasi langsung terhadap pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana Alesandra Da Cunha, Henrikus Herdi, & Pipiet Niken Aurelia. (2023). Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 86–100. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1195>
- Alfredo, A., Tandirau, F., Tandiamal, F. G., Edo, T. J., Meerbothe, V. V., P., Y. S. R., & Asri, M. (2025). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for Money (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023). *MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 397–401.

- <https://doi.org/10.60126/maras.v3i1.751>
- Dewi, A. , R., & Harjanto, T. (2022). Prosedur Pengukuran Kinerja Berbasis Indikator Standar. *Jurnal Evaluasi Sistem*, 9(1), 18–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jes.v9i1.18>
- Erika, & Wahyuni, A. (2023a). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2020-2022). *Community Development Journal*, 4(6), 393–398.
- Erika, & Wahyuni, A. (2023b). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi APBD Provinsi Sumatera Utara 2020-2022). *Community Development Journal*, 4(6), 11393–11398.
- Hasanah, A. (2020). Anggaran sebagai Instrumen Akuntabilitas dalam Sektor Publik. *Jurnal Keuangan dan Tata Kelola*, 8(2), 67–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.25031/jktg.v8i2.67-79>
- Kariyoto, K. (2018). Implementasi Value For Money, Input Output Outcome dan Best Value Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(1), 72–82. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i1.27>
- Kusumawardani, P. , & Nugroho, A. (2019). Reformasi Anggaran: Mewujudkan Transparansi melalui Sistem Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 6(2), 67–69. <https://doi.org/10.23917/japem.v6i2.67-79>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (4th ed., Vol. 1). Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Andi Publisher.
- Mardiasmo. (2021a). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Value for Money Periode 2019-2021. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 17(1).
- Mardiasmo. (2021b). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Value for Money Periode 2019-2021. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer (ABIS)*.
- Margareta, S., Setiawan, A. B., Warizal, & Triwidatin, Y. (2023). Analysis of Performance Measurement Using the Value For Money Method at Departments in the City of Bogor. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(8), 1135–1150. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i8.5668>
- Pamel, R. , Puspita Sari, R., & Candra, R. (2024). Value For Money Kinerja Keuangan Pada Kabupaten Tanah Datar. *Jaksysa: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2).
- Pemerintah. (2003). *APBN - Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.
- Pemerintah Republik indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.05/2013 tentang tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)*.
- Polii, I. , Saerang, D. , & Tangkuman, S. , A. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan

- Konsep Value For Money. *Jurnal EMBA*, 8(4), 781–788.
- Prasetya, D., Saladin, H., & Nurmala, N. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value for Money Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung (OKI). *ECo-Fin*, 6(2), 441–451. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1172>
- Putri, R. , N., & Hapsari, D. (2022). Peran Evaluasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Anggaran Dan Evaluasi Publik*, 4(1), 59–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jaep.v4i1.59-72>
- Salsabila Fakhira, & Zaenal Muttaqin. (2024). Pengukuran Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.2703>
- Setiawan, A. B. , Anwar, S. , Zamaludin, A. , & Annurul, D. S. ,. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Value For Money Pada Satuan Kerja Balai Penelitian Tamanan Hias Kabupaten Cianjur. *Jurnal Akunida*, 6(2).
- Sirait, L. , R. , N., Delvianti, & Ardiany, Y. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap kinerja Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mentawai. *Jurnal Pareso*, 4(1), 169–186.
- Siregar, & Baldric. (2017). *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis keuangan pemerintah daerah berbasis aktual* : Vol. cetakan pertama (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- Utomo, S. , H., & Puspitasari, E. (2021). Analisis Penerapan Value for Money pada Instansi Pemerintah: Studi Efisiensi dan Efektivitas. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 87–98.
- <https://doi.org/https://doi.org/10.2402/jia.v14i2.3672>
- Verliana Diva, Sonny Francisco Siboro, Anila Ambarani, & Adella Yudanti. (2024). Analisis Value for Money terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Depok Tahun Anggaran 2021-2023. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 79–90. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.534>
- Wakhid Yulyianto, Wahyuningsih, S., Kurniasih, R., & Waluyo, A. (2023). Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan “Value For Money” Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas “X” di Sektor Publik. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 233–245. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1183>
- Wibowo, S. (2021, September 15). *Bone Bolango jadi Pilot Evaluasi LPPD Kabupaten Se-Indonesia Timur*. Sindo News. <https://daerah.sindonews.com/read/541124/97/bone-bolango-jadi-pilot-evaluasi-lppd-kabupaten-seindonesia-timur-1631675347>
- Yulyianto, W., Wahyuningsih, S., Kurniasih, R., & Waluyo, A. (2023). Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan “Value For Money” Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas “X” di Sektor Publik. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 233–245. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1183>